

# KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19



**MUHAMMAD KAISAR JANUARDI**  
**E041181502**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN  
EKONOMI KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19**

**MUHAMMAD KAISAR JANUARDI  
E041181502**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN  
EKONOMI KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19**

**MUHAMMAD KAISAR JANUARDI  
E041181502**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

Pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN EKONOMI  
KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19**

Disusun dan Diajukan Oleh

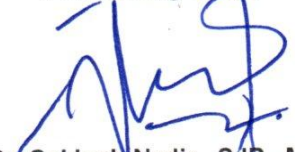
**MUHAMMAD KAISAR JANUARDI**

**E041181502**

Telah disetujui oleh

Menyetujui

Pembimbing Utama

  
**Dr. Sakinah Nadir., S.IP., M.Si**  
NIP. 197912182008122002

Pembimbing Pendamping

  
**Ummi Suci Fathia Bailusy., S.IP., M.IP**  
NIP. 199205022019044001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik  
  
**Dr. Sakinah Nadir., S.IP., M.Si**  
NIP. 197912182008122002



**HALAMAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN EKONOMI  
KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19**

Disusun dan Diajukan Oleh  
**MUHAMMAD KAISAR JANUARDI**  
**E041181502**

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi Pada  
Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
**Panitia Ujian**

Ketua Dr. Sakinah Nadir., S.IP., M.Si (.....)

Sekretaris Ummi Suci Fathia Bailusy., S.IP., M.IP (.....)

Anggota Dr. Muh. Imran., S.IP., M.Si (.....)

Anggota Dr. Ariana Yunus., S.IP., M.Si (.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19**" adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan sebagian skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 15 April 2024

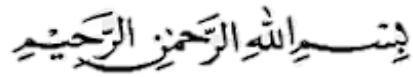
Yang Menyatakan



MUHAMMAD KAISAR JANUARDI

E041181502

## UCAPAN TERIMA KASIH



Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala berkah rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PROGRAM LORONG WISATA DALAM PEMULIHAN EKONOMI KOTA MAKASSAR PASCA COVID-19”**. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mulia, serta sebagai suri tauladan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama pada ayah dan ibu beserta dengan saudara-saudara penulis yang telah memberikan penulis kekuatan dan semangat untuk terus menyelesaikan skripsi penulis. Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan banyak kemajuan bagi sistem pendidikan dan dalam mempermudah administrasi di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberikan ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen- dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP,

M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, serta arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis.
6. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran diluar perkuliahan formal, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
7. Kepada teman-teman sahabat Ilmu Politik 2018 yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
8. Kepada saudara saudaraku Revolusi18 Terima kasih telah menjadi saudara yang sangat baik yang selalu membantu dan mendukung dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

Selanjutnya, penulis berterima kasih kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebut secara keseluruhan. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih

Makassar, 15 April 2024

Penulis

Muhammad Kaisar Januardi



## ABSTRAK

**Muhammad Kaisar Januardi, E041181502, Kebijakan Program Lorong Wisata Dalam Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Pasca Covid-19. Dibawah bimbingan Sakinah Nadir dan Ummi Suci Fathia Bailusy**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan implikasi kebijakan program Lorong Wisata dalam pemulihan ekonomi Kota Makassar Pasca COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan teknik pengumpulan data bersifat *purposive sampling*, yaitu Walikota Makassar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Camat Mamajang, Ketua RW di salah satu Kec. Mamajang serta salah satu pelaku UMKM di Kec. Mamajang. Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program melibatkan faktor struktur birokrasi yang meliputi pelibatan seluruh SKPD; faktor komunikasi yang meliputi pola komunikasi yang lemah diantara SKPD; faktor sumber daya yang meliputi pelibatan SKPD sesuai dengan tupoksi dan jobdesk dalam realisasi; dan faktor disposisi/sikap dari pelaksana yang ditandai dengan sikap yang cenderung lemah dalam merealisasikan program lorong wisata. Adapun program lorong wisata berimplikasi ekonomi yang meliputi peningkatan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja hingga nilai investasi di Kec. Mamajang; implikasi sosial yang meliputi penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan indeks pembangunan manusia, serta tingkat partisipasi kerja dan persentase penduduk miskin yang cenderung fluktuatif; serta implikasi lingkungan yang meliputi ketersediaan 63 jalan lorong atau 67% dalam kondisi baik; 33 drainase atau 36% dengan kondisi baik, serta penggunaan 384 lampu atau 92,75% di setiap lorong di Kec. Mamajang, dengan 30 jalan lorong atau 31,9% dalam kondisi rusak; 50 drainase atau 55,5% yang perlu dibenahi; dan 30 lampu atau 0,72% yang tidak menyala atau di setiap lorong yang ada di Kec. Mamajang

**Kata Kunci: UMKM, Lorong Wisata, Pandemi, Mamajang**

## ABSTRACT

**Muhammad Kaisar Januardi, E041181502, Lorong Wisata Program Policy in the Economic Recovery of Makassar City After Covid-19.** Under the guidance of Sakinah Nadir and Ummi Suci Fathia Bailusy

The purpose of this study is to find out the implementation and policy implications of the Lorong Wisata program in the economic recovery of Makassar City after COVID-19. This research is a descriptive qualitative research, the type of data used is primary data obtained through observation and in-depth interviews with purposive sampling data collection techniques, namely the Mayor of Makassar, the Head of the Makassar City Tourism Office, the Head of the Mamajang Sub-District, the Head of RW in one of the Mamajang Districts and one of the MSME actors in Mamajang District. The results of research in this study show that program implementation involves bureaucratic structure factors which include the involvement of all SKPD; communication factors which include weak communication patterns among SKPD; resource factors which include the involvement of SKPD in accordance with tupoksi and jobdesk in realization; and the disposition / attitude factor of the implementer which is characterized by an attitude that tends to be weak in realizing the tourist alley program. The lorong wisata program has economic implications which include increasing the number of business units, employment to the value of investment in Mamajang District; Social implications include a decrease in the open unemployment rate and an increase in the human development index, as well as the fluctuating employment participation rate and percentage of the poor; and environmental implications which include the availability of 63 laneways or 67% in good condition; 33 drainages or 36% in good condition, as well as the use of 384 lamps or 92.75% in each alley in Kec. Mamajang, with 30 alley roads or 31.9% in damaged condition; 50 drainages or 55.5% that need to be addressed; and 30 lights or 0.72% that are not on or in every hallway in Kec. Mamajang

**Keywords: MSMEs, Tourist Alley, Pandemic, Mamajang**

---

---

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENERIMAAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Konsep Kebijakan Publik.....	9
1.6 Program Lorong Wisata.....	12
1.7 Pandemi COVID-19.....	14
1.8 Penelitian Terdahulu.....	6
1.9 Kerangka Berpikir.....	16
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b> .....	18
2.1 Dasar dan Tipe Penelitian.....	18
2.2 Objek dan Lokasi Penelitian.....	18
2.3 Sumber Data.....	19
2.3.1 Data Primer.....	19
2.3.2 Data Sekunder.....	19
2.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
2.4.1 Wawancara.....	20
2.4.2 Observasi.....	21
2.4.3 Narasumber/Informan penelitian.....	21
2.4.4 Studi pustaka ( <i>library research</i> ).....	22
2.5 Teknik Analisis Data.....	22
2.5.1 Reduksi data.....	22
2.5.2 Penyajian data.....	22
2.5.3 Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
3.2 Kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar.....	32
3.3 Implementasi Kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.....	33
3.4 Implikasi Kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.....	44
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53

4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yaitu suatu fenomena wabah penyakit yang tersebar secara global, berasal dari penyakit menular yang disebabkan oleh virus sindrom pernapasan akut Sindrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Virus<sup>1</sup>. Adanya fenomena pandemi telah mempengaruhi segala aspek dalam suatu negara termasuk perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan dalam bentuk keputusan Presiden tentang penetapan status pandemi COVID-19 (*Coronavirus disease 19*) sebagai bencana nasional<sup>2</sup>. Menanggapi keputusan tersebut, maka setiap pemerintah daerah di Indonesia tentu melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak dari fenomena pandemi tersebut, adapun salah satu pemerintah daerah yang turut andil dalam mengimplemmentasikan kebijakan dalam mengatasi dampak tersebut adalah pemerintah Kota Makassar.

Dalam mengatasi dampak tersebut, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan produk hukum berupa penanganan dampak COVID-19 melalui PERWALI No. 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Program *Makassar Recover* adalah sebuah program penanggulangan dari dampak pandemi COVID-19 yang diimplementasikan kedalam tiga sub program yaitu (i) imunitas kesehatan, (ii) adaptasi sosial dan (iii) pemulihan ekonomi<sup>3</sup> dimana tujuan dari program *Makassar Recover* tentu saja untuk menyikapi dampak yang dihasilkan dari pandemi COVID-19 di Kota Makassar.

*Makassar Recover* adalah *Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Service (Recover)* adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dengan melalui protokol penanganan secara tepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan COVID-19. Secara spesifik, terdapat tiga sub program dalam *Makassar Recover* yaitu imunitas kesehatan yaitu cara meningkatkan imunitas kesehatan warga daerah dalam menghadapi pandemi COVID-19; adaptasi sosial adalah upaya penyesuaian diri yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat agar disiplin dan taat protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi COVID-19;

---

<sup>1</sup> WHO. 2023. *Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic*. Diambil kembali dari WHO: <https://www.who.int/europe/emergencies/situations/COVID-19>

<sup>2</sup> Juaningsih, I., & Consuello, Y. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, Hal: 518.

<sup>3</sup> Aan Ariska Febriansyah. 6 Maret 2021. Apa itu Makassar Recover, Program Baru Pemerintah Kota Makassar 2021. *Jurnal Makassar.com*. <https://jurnalmakassar.pikiran-rakyat.com/makassar/pr-821545360/apa-itu-makassar-recover-program-baru-pemerintah-kota-makassar-2021?page=2>. Diakses pada 23 Agustus 2023

pemulihan ekonomi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian atau respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi<sup>4</sup>.

Tujuan dari PERWALI tersebut adalah untuk meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat dalam masa pandemi, memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik di masa pandemi COVID-19, mewujudkan Makassar yang pulih, sehat dan selamat dari pandemi COVID-19, serta menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali ekonomi daerah<sup>5</sup>.

Dalam program *Makassar Recover* pada bagian imunitas kesehatan terdiri dari sebelas (11) kegiatan yaitu Persiapan; Kampanye Program dan Membangun "TRUST"; *Public Engagement* dan Pembentukan Tim; *Teaching, Training and Registration*; *Screening* awal dan *Barcoding*; *Screening Lanjutan Testing* dan *Big Data, Triase* dan Tindakan Medis; Notifikasi Status Kesehatan Masyarakat dan *Public Report*; Proteksi, Pemeliharaan, Dukungan dan Doa; Indeks kepatuhan Protokol Kesehatan (IKPK); serta *Reward* dan *Punishment*<sup>6</sup>.

Pada program adaptasi sosial terdapat sembilan (9) kegiatan yaitu Kampanye, *Teaching* dan *Training*; Protokol Mingguan; Protokol 5 M & Protokol Keselamatan; Protokol Pintu Masuk; Protokol Event; Protokol Bisnis dan Usaha; Protokol Perbatasan; Indeks Kepatuhan Protokol Kesehatan (IKPK), serta *Reward & Punishment*. Adapun untuk program pemulihan ekonomi terdapat enam kegiatan yaitu kampanye, *Teaching* dan *Training*; Hibridisasi Ekonomi; Ekonomi Normal Baru; Insentif Ekonomi, Taat Prokes; Bangkitkan Ekonomi baru, Total Pemberdayaan Masyarakat; serta *Makassar Virtual Economic Center (MAVEC)*<sup>7</sup>.

Dalam sektor pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Makassar melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah Lorong Wisata. Lorong Wisata (LONGSWIS) merupakan salah satu indikator penilaian kinerja ketua Rukun Tetangga (RT) berdasar pada pelaporan berbasis QRCode. Kehadiran Lorong Wisata berangkat dari PERWALI No. 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan atau indikator penilaian pada Lorong Wisata (LONGWIS) yaitu meliputi jumlah lorong wisata (LONGWIS) yang ditangani oleh masing-masing Ketua RT dan dibina oleh Ketua RW; serta tersedianya bukti dokumentasi foto kondisi dan foto tahapan kegiatan penanganan dan

---

<sup>4</sup> PERWALI No. 5 Tahun 2021 Tentang Makassar Reconvert.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Geminastiti Sakkir, Muh. Miftah Fauzan, Muji Iswanty & Andi Muhammad Irawan. 2022. Program Kebijakan Makassar Recover dalam Penanggulangan COVID-19 di Kota Makassar. Seminar Nasional Hasil Penelitian 2022: Membangun Negeri dengan Inovasi tiada Henti Melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 580-593

<sup>7</sup> Ibid

pembinaan Lorong Wisata mulai 25% (dua puluh lima persen), 50% (lima puluh persen) hingga 100% (seratus persen) dimana dalam penilaiannya dilakukan oleh tim yang beranggotakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Bagian Pemberdayaan Masyarakat Camat; Lurah dan Unsur SKPD terkait. Namun, hal tersebut tergantung pada ketetapan atau keputusan Walikota<sup>8</sup>.

Program Lorong Wisata adalah salah satu program unggulan Danny Pomanto dimana beliau percaya bahwa pengentasan kemiskinan dengan masyarakat yang ada di Lorong Wisata yang kemudian terbagi kedalam tiga fokus utama yaitu imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat dan imunitas lingkungan yang kuat.

Perumusan PERWALI No. 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dilakukan untuk menata ulang fungsi dan tugas RT dan RW dengan memilih ketua RT dan ketua RW yang berkualitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, seperti penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dimana indikator dari penilaian tersebut berujung pada penilaian pada Lorong Wisata<sup>9</sup>. Hal ini juga sejalan dengan PERWALI No. 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover yang bertujuan, salah satunya u

ntuk menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali ekonomi daerah

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat meningkatkan aspirasi, kualitas, pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dimana Kota Makassar memiliki banyak lorong di setiap wilayahnya sehingga dengan mengacu pada dua PERWALI tersebut, yaitu PERWALI No. 5 Tahun 2021 Tentang Makassar Recover dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, serta PERWALI No. 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang dilakukan untuk menata ulang fungsi dan tugas RT dan RW yang berkualitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kota Makassar melalui pengembangan atau pelaksanaan Lorong Wisata.

Hal ini kemudian didukung dengan pernyataan Wali Kota Makassar Danny Pomanto bahwa kebijakan Lorong Wisata terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi di Kota Makassar yang mengacu pada data BPS Kota Makassar dimana pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,40% dari sebelumnya 4,47%. Selain itu inflasi di Makassar juga turun, tercatat sejak November 2022 mencapai 5,99%, turun mencapai 5,72% pada Februari 2023<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> PERWALI No. 27 Tahun 2022 Tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

<sup>9</sup> Op.Cit. PERWALI

<sup>10</sup> Website Resmi Pemerintah Kota Makassar. 6 April 2023. Gagasan Danny Pomanto Bentuk Lorong Wisata, Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi dan Tekan Inflasi di

Terdapat lima belas kecamatan yang dimana lorong-lorong yang dimilikinya dijadikan sebagai program lorong wisata Kota Makassar yaitu Kecamatan Tallo dengan 105 lorong, Kecamatan Makassar dengan 98 lorong, Kecamatan Rappocini dengan 78 lorong, Kecamatan Tamalanrea dengan 57 lorong, Kecamatan Tamalate dengan 75 lorong, Kecamatan Sangkarang dengan 21 lorong, Kecamatan Ujung Pandang dengan 70 lorong, Kecamatan Mariso dengan 59 lorong, Kecamatan Bontoala dengan 84 lorong, Kecamatan Panakukang dengan 77 lorong, Kecamatan Manggala dengan 66 lorong, Kecamatan Biringkanaya dengan 61 lorong, Kecamatan Wajo dengan 56 lorong, Kecamatan Ujung Tanah dengan 63 lorong dan Kecamatan Mamajang dengan 91 lorong<sup>11</sup>.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat tiga Kecamatan yang memiliki lorong terbanyak yaitu Kecamatan Tallo dengan 105 lorong, Kecamatan Makassar dengan 98 lorong, serta Kecamatan Mamajang dengan 91 lorong. Namun, dari ketiga Kecamatan tersebut, hanya Kecamatan Mamajang yang memiliki capaian digitasi peta lorong wisata yang cukup tinggi yaitu sebesar 96%, dimana Kecamatan Tallo sebesar 40% dan Kecamatan Makassar sebesar 86%. Adanya pemetaan atau digitasi peta lorong wisata akan memudahkan analisis mengenai penelitian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan program lorong wisata di Kota Makassar dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Kecamatan Mamajang sendiri merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lainnya, dimana di sebelah utara adalah Kecamatan Makassar dan Ujung Pandang, di sebelah Timur adalah Kecamatan Rappocini, disebelah selatan adalah Kecamatan Tamalate, dan disebelah barat adalah Kecamatan Mariso. Di dalam Kecamatan Mamajang terdiri dari 13 Kelurahan yang meliputi Tamparang Keke, Sambung Jawa, Karang Anyar, Baji Mappakasunggu, Pa'batang, Parang, Bonto Lebang, Mamajang Dalam, Labuang Baji, Bonto Biraeng, Mandala, Maricaya Selatan, dan Mamajang Luar<sup>12</sup>.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implikasi Kebijakan Program Lorong Wisata dalam Pemulihan Ekonomi di Kota Makassar Pasca COVID-19”.

---

Makassar. <https://makassarkota.go.id/gagasan-danny-pomanto-bentuk-lorong-wisata-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-dan-tekan-inflasi-di-makassar/>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

<sup>11</sup> Andi Jaka. 18 Juni 2022. Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Target Rampungkan Digitasi Peta Lorong Wisata. Suara Lidik. <https://www.suaralidik.com/dinas-penataan-ruang-kota-makassar-target-rampungkan-digitasi-peta-lorong-wisata/>. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2023

<sup>12</sup> BPS Kota Makassar. 2021. Kecamatan Mamajang Dalam Angka 2021. Makassar: BPS Kota Makassar



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan suatu rumusan masalah sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi di Kota Makassar Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang ?
2. Bagaimana implikasi Kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi di Kota Makassar Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai rumusan masalah penelitian, maka terdapat pula tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program lorong wisata Kota Makassar di Kecamatan Mamajang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi Kota Makassar Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebelumnya maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang serupa dengan topik penelitian ini, yaitu dalam menangani dampak pandemi atau kondisi yang semisal dengan hal tersebut, terhadap peningkatan ekonomi suatu wilayah baik kabupaten maupun kota. Serta dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sebuah kebijakan dengan menggunakan metode alternatif dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah kabupaten/kota yang dimilikinya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan metode alternatif bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan berbagai metode yang dapat digunakan apabila diperhadapkan kondisi yang serupa dengan pandemi maupun pandemi itu sendiri di masa depan.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan bahan referensi. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng & Liberthin Palullungan yang berjudul “*Strategi dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi COVID-19*” pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai bagaimana strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor koperasi dan UMKM Pasca Pandemi COVID-19. Adapun model penelitian yang digunakan adalah *mix method*, yang bertujuan untuk menemukan data dan informasi tentang kondisi pelaku UMKM dan Koperasi, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang dapat ditempuh antara lain: pertama, pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha. Kedua, perluasan pembiayaan modal kerja yaitu memfasilitasi untuk mendapatkan penjaminan lunak atau pinjaman dana bergulir melalui surat keterangan dan rekomendasi kelayakan Koperasi dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman dana bergulir dari Lembaga yang akan memberikan pinjaman seperti dari kementerian Koperasi yaitu yang dikenal LPDB. Ketiga, penyediaan penyangga produk melalui pembinaan administrasi dan pembukuan dari Dinas Koperasi pendampingan proses produksi dan Pemasaran dari Dinas Pariwisata untuk kegiatan lorong. Keempat, strategi pengembangan destinasi wisata yaitu melalui destinasi wisata lorong<sup>13</sup>.

Adapun perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan dampak kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah

---

<sup>13</sup> Imran Tajuddin, Apriana Toding, Petrus P. Roreng & Liberthin Palullungan. 2021. Strategi dan arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar.

Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor koperasi dan UMKM Pasca Pandemi COVID-19.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aswar Annas yang berjudul "*Kebijakan Adaptif terhadap Penanganan Pandemi COVID-19*" pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai untuk mengetahui dan menganalisis dampak pelaksanaan program *Makassar Recover* terhadap penanganan COVID-19 bagi masyarakat Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif yang menunjukkan pengaruh program *Makassar Healing* terhadap Dimensi Imunitas Kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 98% orang telah mengalami peningkatan kekebalan melalui vaksinasi. Pemerintah juga telah membentuk satgas khusus Detektor, Raika, dan Pemburu Covid dengan melibatkan 55% masyarakat. Mendonasikan 12.000 paket PCR kit, 4.000 paket jamu tradisional, dan 100.000 masker kesehatan serta menyediakan 1.166 posko pemulihan. Pemerintah juga selalu memastikan penanganan triase, testing, dan tracing, dan Satgas Pemulihan yang menanganinya. Dimensi Adaptasi Sosial, Pemkot Makassar telah mensterilkan 509 fasos dan fasilitas umum dengan melakukan penyemprotan disinfektan, menyiapkan 1.500 tempat cuci tangan gratis, dan alat pengukur suhu tubuh, scan QR Code Card, dan pengecekan QR Card untuk handphone, serta menyediakan media edukasi dan call center siaga COVID-19 bagi masyarakat. Dimensi Pemulihan Ekonomi membentuk ruang bagi *start-up* sebagai pelaku usaha baru sebanyak 45% pelaku UMKM dan 37% unit koperasi aktif dan memberikan modal<sup>14</sup>.

Adapun perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan dampak kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai dampak pelaksanaan program *Makassar Recover* terhadap penanganan COVID-19 bagi masyarakat Kota Makassar.

Ketiga, Penelitian oleh Ulil Maulanan Suardi dengan penelitian yang berjudul "*Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Program Makassar Recover*" pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan ekonomi melalui program Makassar Recovery dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui Program Makassar Recovery.

---

<sup>14</sup> Aswar Annas. 2023. Kebijakan Adaptif Terhadap Penanganan Pandemi COVID-19. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Hlm 487-506

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidikan dan triangulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dalam pelaksanaan Program Makassar Recover yaitu Imunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial dan juga Pemulihan Ekonomi. Dalam Implementasinya, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan kampanye, Hibridisasi ekonomi, ekonomi baru, insentif ekonomi taat prokes, bangkitan ekonomi baru, serta *Makassar Virtual Economic Centre (MAVEC)*. Namun, evaluasi dari strategi tersebut adalah masih perlu adanya perbaikan agar hasilnya lebih maksimal lagi. Adapun faktor penghambat dan Faktor pendukung Program Makassar Recovery dimana faktor penghambat meliputi tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dan faktor pendukung meliputi Komunikasi dan disposisi<sup>15</sup>.

Adapun perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan dampak kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai strategi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan ekonomi melalui program Makassar Recovery dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan strategi pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui Program Makassar Recovery.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Dwin Putra Abadi Purnama Ismail yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Program Makassar Recovery dalam Penanganan COVID-19 di Kota Makassar*" pada tahun 2023. Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Program *Makassar Recover* dalam penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe deskriptif analitik yaitu dengan mengeksplor fenomena mengenai implementasi kebijakan program *Makassar Recovery* dalam penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan yaitu Strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik Lembaga dan tingkat kepatuhan. Dalam pelaksanaan kebijakan Program Makassar recovery menemukan bahwa keberhasilan kebijakan program

---

<sup>15</sup> Uliil Maulana Suardi,. 2022. Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah Melalui Program Makassar Recover. Makassar: Universitas Muhammadiyah

Makassar recovery tidak terlepas dari Dinas Kesehatan dan dinas terkait yang turut andil dalam melakukan penanganan COVID-19 ini dan seluruh elemen yang terlibat mampu menjalankan tugas nya dengan baik sehingga 3 ekosistem *Makassar recovery* yaitu imunitas Kesehatan ,adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik Sehingga masyarakat yang terdampak Penyebaran Virus COVID-19 dapat beradaptasi dengan baik dan Keefektifan Program *Makassar Recovery* dalam menanggulangi bencana COVID-19 meraih penghargaan pada ajang Indonesia Awards 2021 yang diadakan MNC Inews<sup>16</sup>.

Adapun perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar terhadap pemulihan ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 di Kecamatan Mamajang, sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi kebijakan program *Makassar Recovery* dalam penanganan COVID-19 di Kota Makassar..

## 1.6 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kekuasaan kepada masyarakat luas atau publik untuk menyelesaikan hasil akhir dari apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Coryanata, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai sebuah hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah<sup>17</sup>. Adapun menurut Aslinda (2023), Kebijakan publik adalah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah, berkenaan dengan tujuan yang dipilih berserta cara-cara untuk mencapai tujuan yang dipilih untuk kepentingan seluruh masyarakat<sup>18</sup>. Menurut Samodra Wibawa dalam Mustari (2015)<sup>19</sup>, kebijakan publik merupakan penskalaprioritasan tuntutan yang perlu dikelola atau dipenuhi. Terakhir, menurut Edward III dalam Aisyah (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Apa yang

---

<sup>16</sup> Muh. Dwin Putra Abadi Purnama Ismail. 2023. Implementasi Kebijakan Program Makassar Recovery dalam Penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Makassar: Universtas Hasanuddin

<sup>17</sup> I. Coryanata. 2011. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Journal of Accounting and Investment*. 110-125

<sup>18</sup> Aslinda. 2023. Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan. Yogyakarta: K-Media

<sup>19</sup> Nuryanti Mustari. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio

pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Ini adalah tujuan atau sasaran program pemerintah”<sup>20</sup>.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan<sup>21</sup>. Namun terdapat beberapa tahap dalam kebijakan publik sebagaimana menurut Budi Winarno (2007) yaitu sebagai berikut

1. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini, suatu masalah tidak disentuh sama sekali. Namun, masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau terdapat pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Dalam tahap ini, masalah telah masuk kedalam agenda kebijakan yang kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Pembahasan tersebut akan mengacu pada pemecahan masalah terbaik yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dimana pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Pada tahap ini, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini, suatu program kebijakan akan menjadi catatanbagi para elit apabila program tidak terimplementasikan oleh badan maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh beberapa unit yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun terdapat pula beberapa yang akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk

---

<sup>20</sup> Mirza & Siti Aisyah. 2020. Analisis Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia. 14-34

<sup>21</sup> Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.<sup>22</sup>

Menurut Wibawa, Purbokusumo & Pramusinto<sup>23</sup> (1994), kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Mengenai komponen ketiga biasanya berkaitan dengan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Hal inilah yang kemudian disebut dengan implementasi<sup>24</sup>. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat pula beberapa hal yang perlu diperhatikan. Namun, sebelumnya perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan<sup>25</sup>.

Adapun menurut Wahab<sup>26</sup> (1997), implementasi kebijakan merupakan suatu penting dari keseluruhan proses kebijakan. Hal ini juga sependapat dengan pendapat dari Edwards III. Dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy*<sup>27</sup> (1980), ia menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik maka terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik sebagaimana menurut Edward III yaitu sebagai berikut<sup>28</sup>.

1. Struktur Birokrasi/ kewenangan, dimana dalam penelitian ini dimaknai sebagai struktur organisasi pemerintah Kota Makassar yang memiliki kewenangan/wewenang dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan program lorong wisata di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tentu saja implikasi yang diharapkan dalam aspek struktur birokrasi/kewenangan adalah adanya

---

<sup>22</sup> Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

<sup>23</sup> Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo & Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo

<sup>24</sup> Jumroh & M. Yoga Jusri Pratama. 2021. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Nagari Koto Baru: Insan Cendekia Mandiri

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasis ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>27</sup> George C. Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press

<sup>28</sup> Ibid

kemudahan yang didapatkan dalam merealisasikan kebijakan program lorong wisata Kota Makassar sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah realisasi kebijakan program lorong wisata Kota Makassar.

2. Komunikasi, dimana dalam penelitian ini dimaknai sebagai pola komunikasi yang terjalin antara personil-personil yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan program lorong wisata di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tentu saja implikasi yang diharapkan dalam aspek komunikasi adalah adanya komunikasi yang terarah dan jelas pada pelaku yang merealisasikan kebijakan program lorong wisata Kota Makassar sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah realisasi kebijakan program lorong wisata Kota Makassar
3. Sumber daya, dimana dalam penelitian ini dimaknai sebagai seluruh staf/pelaku/aktor beserta keahlian yang dimilikinya, seluruh informasi yang mendukung realisasi dari kebijakan program lorong wisata, serta fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan program lorong wisata di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tentu saja implikasi yang diharapkan dalam aspek sumber daya adalah adanya sumber daya yang memumpuni sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah realisasi kebijakan program lorong wisata Kota Makassar.
4. Disposisi atau sikap dari pelaksana, dimana dalam penelitian ini dimaknai sebagai sikap dan keinginan para pelaku/aktor dalam merealisasikan kebijakan program lorong wisata di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Tentu saja implikasi yang diharapkan dalam aspek disposisi atau sikap dari pelaksana adalah adanya motivasi dan keinginan yang kuat dari pelaku yang merealisasikan kebijakan program lorong wisata Kota Makassar, sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah realisasi kebijakan program lorong wisata Kota Makassar.

Berdasarkan keempat aspek tersebut yang turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu kewenangan, komunikasi, sumber daya dan disposisi yang antar komponen saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan memahami dan memperhatikan keempat aspek tersebut.

## **1.7 Program Lorong Wisata**

Sebelumnya, program lorong wisata sendiri dikenal begitu melekat dengan kepribadian Danny Pomanto dalam menjalankan kebijakannya. Hal ini didukung dengan pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar Muhammad Rheza bahwa Wali Kota Danny Pomanto



dikenal sebagai anak '*Lorongna Makassar*' sehingga fokus kebijakannya mengarah kepada pengembangan lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. program Program Lorong Wisata merupakan salah satu program unggulann Pemerintahan Danny Pomanto dimana beliau percaya bahwa pengentasan kemiskinan dengan masyarakat yang ada di Lorong Wisata. Dalam program tersebut, terdapat 21 konten yang menjadi tujuan dari dihadirkannya Lorong Wisata yang kemudian terbagi kedalam tiga fokus utama yaitu imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat dan imunitas lingkungan yang kuat. Adapun 21 konten tersebut meliputi *Food Security, Inflation Control, Circular Economy, UMKM Digital Per Lorong, Startup Lorong, Destinasi Wisata Makan Enak, Destinasi Wisata Sejarah dan Seni, Digital Waste Bank, Community Empowerment, Public Engagement, Social Cohesion, Social Mitigation, Social Share & Care, New Jobs & New Business Opportunity, City Farming, City Garden, Net Zero Carbon City, Healthy Alleys, Sombere and Smart City, Public Safety dan Resilient City*<sup>29</sup>.

Program lorong wisata ini sendiri mulai dijalankan pada awal bulan November 2021, dimana hal ini beriringan dengan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 3 menjadi level 2.<sup>30</sup> Moh. Roem yang ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pariwisata Makassar sekaligus pelaksana tugas dalam pelaksanaan program lorong wisata ini menyatakan bahwa program ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah koata Makassar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pasca terjadinya pandemi COVID-19.

Program lorong wisata Makassar ini menjadi salah satu program andalan dari walikota Makassar. Lorong wisata ini bahkan menjadi salah satu program yang mengikuti Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.<sup>31</sup> Walikota Makassar optimis program lorong wisata ini mampu menjadi inovasi nomor satu di tingkat nasional. Setelah mengikuti berbagai tahapan presentasi dan juga wawancaa yang dilakukan oleh kementerian PPN/BAPPENAS, Makassar dinyatakan berhasil memasuki sepuluh besar di tingkat nasional pada ajang ini (Mas'ud, 2023).<sup>32</sup>

Program lorong wisata ini dapat digadang-gadang sebagai bagian dari strategi Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan potensi

---

<sup>29</sup> Op.Cit. Muhammad Rifky

<sup>30</sup> Muh. Hasanuddin. 23 Oktober 2021. Lorong Wisata Makassar mulai dijalankan pada awal November 2021. <https://makassar.antaranews.com/berita/313729/lorong-wisata-makassar-mulai-dijalankan-pada-awal-november-2021>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>31</sup> Muh. Hasanuddin. 9 Februari 2023, Program Lorong Wisata Pemkot Makassar Ikuti Ajang PPD 2023. <https://makassar.antaranews.com/berita/460986/program-lorong-wisata-pemkot-makassar-ikuti-ajang-ppd-2023> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>32</sup> Edwin Mas'ud. 24 Maret 2023, Lorong Wisata Antarkan Makassar Masuk 10 Besar PPD 2023 <https://www.rri.co.id/daerah/196233/lorong-wisata-antarkan-makassar-masuk-10-besar-ppd-2023>. diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

pariwisata yang ada di Kota Makassar dengan mengacu pada landasan konsep sapta pesona dan sadar wisata. Salah satu hal yang dilakukan dalam mengaktualisasikan konsep tersebut, Dinas Pariwisata Kota Makassar kemudian menyelenggarakan sebuah program kegiatan pengelolaan daya tarik wisata pada beberapa lorong wisata di ota Makassar. Acara ini dibukan secara langsung oleh Andi Tenri Langka selaku perwakilan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.<sup>33</sup>

## 1.8 Pandemi COVID-19

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah sebuah wabah yang menjangkit secara serempak ada di mana-mana, dimana daerah yang dijangkit merupakan geografi secara luas.<sup>34</sup> Oxford Learner's Dictionaries, *pandemic* atau *pandemic* dapat diartikan sebagai sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh negara atau seluruh dunia.<sup>35</sup> Berdasarkan pengertian di atas, maka *pandemic* dapat dikatakan sebagai sebuah wabah ataupun penyakit yang menimpa masyarakat secara luas dalam waktu serentak sehingga mampu memberikan dampak yang besar bagi wilayah-wilayah terdampak.

Dunia internasional baru-baru ini, tepatnya pada tahun 2020 harus menghadapi sebuah *pandemic* yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya. *Pandemic* ini dikenal dengan *pandemic COVID-19*. *COVID-19* atau *Coronavirus disease* menurut *World Health Organization* (WHO) merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2.<sup>36</sup> Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Januari 2020 yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia.<sup>37</sup> Sejak tersebarnya virus ini, menyebabkan pneumonia berat dengan tingkat kematian 2,9% hingga 9,6% karena kemampuannya untuk menginfeksi sel manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan status *COVID-19* sebagai *pandemic*. Penyakit ini menyebabkan orang yang terkena virus kemudian mengalami kondisi berupa serangan penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan dapat sembuh dari kondisi tersebut tanpa memerlukan adanya perawatan khusus. Namun, tidak hanya kondisi itu

---

<sup>33</sup> Admindispar, 2023, Explore Makassar: Memaksimalkan Potensi Pariwisata Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar Menggelar Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota, dalam Program Lorong wisata Pemkot Makassar ikuti ajang PPD 2023 - ANTARA News Makassar diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, Pandemi, dalam Hasil Pencarian - KBBI Daring (kemdikbud.go.id) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandemi>

<sup>35</sup> Oxford Learner's Dictionaries, "Pandemic," dalam *pandemic\_1* noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>36</sup> World Health Organization, Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic, dalam *Coronavirus* (who.int) diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

<sup>37</sup> Marco Ciotti, Massimo Cicozzi, Alessandro Terrinoni, Wen-Can Jiang, Cheng-Bin Wang & Sergio Bernardini, 2020, The COVID-19 Pandemic, *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, doi: <https://doi.org/10.1080/10408363.2020.1783198>

yang dihadapi oleh para penderita yang terjangkit virus SARS-CoV-2 ini, dimana hal ini juga bisa menyebabkan penyakit parah dan memerlukan penanganan medis khusus.<sup>38</sup>

Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi menjangkiti seorang wanita yang pernah melakukan kontak dengan salah seorang korban ke-24 dari Malaysia.<sup>39</sup> Kasus ini kemudian diikuti oleh ibu dari orang pertama tersebut dan kemudian terus bertambah dari hari ke hari. Hingga bulan Agustus 2020, telah di Indonesia telah dikonfirmasi setidaknya ada lebih dari 160 ribu kasus yang terjadi dengan kematian tercatat mencapai hingga 6.994 kasus.<sup>40</sup> Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia ini menjadikan masyarakat semakin merasa tidak aman dan pemerintah berupaya keras untuk memikirkan jalan keluar yang akan ditempuh untuk menangani pandemi dan dampak yang ditimbulkannya tersebut bahkan sejak awal kasus ini dikonfirmasi. Regulasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut dan segera disosialisasikan ke masyarakat antara lain:

1. Pembentukan gugus tugas khusus COVID-19
2. Instruksi mengenai cara menggunakan masker wajah
3. Aturan *social distancing* atau menjaga jarak aman
4. Pengumuman untuk mendorong penelitian dan inovasi terkait upaya melawan pandemi COVID-19
5. Pengumuman harian kasus dan kematian akibat COVID-19, baik secara nasional maupun setiap kabupaten yang ada di Indonesia
6. Kesadaran sosial COVID-19 oleh para ahli melalui webinar online
7. Pengumpulan dan proses data yang ekstensif mengenai COVID-19, dan
8. Seminar terbuka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19<sup>41</sup>.

Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini menjadikan kondisi di seluruh penjuru dunia dari segala aspek menjadi kacau. Seperti layaknya negara-negara lain yang ada di dunia yang juga mengalami dampak dari pandemi ini, Indonesia juga merasakan hal yang sama. Pandemi ini telah menjadi ancaman besar bagi Indonesia dari segala aspek, salah satunya dari segi ekonomi. Sektor ini menjadi sektor yang paling terdampak selain sektor kesehatan bagi setiap negara.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Dewi Susana, 2020, When will the COVID-19 Pandemic in Indonesian End?, Kesmas:Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal), Vol.12 No.4 Hal.160-162

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dikeluarkannya kebijakan “*Lock Down*” sebagai salah satu langkah yang harus diambil pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 yang memaksa perekonomian Indonesia harus terhambat dan tertekan. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah kemudian menggerakkan kementerian, lembaga, maupun pemerintah di setiap daerah atau PEMDA untuk melakukan percepatan belanja terutama pada jadwal triwulan I tahun 2020.<sup>42</sup> Menurut Kementerian Keuangan RI, kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi tekanan pertumbuhan ekonomi di Indonesia akibat pandemic serta terjadinya penurunan harga komoditas.<sup>43</sup>

## 1.9 Kerangka Berpikir

Dalam merealisasikan kebijakan Program Lorong Wisata Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di Kecamatan Mamajang, maka hal yang perlu dilakukan adalah terlebih dahulu perlu memahami mengenai bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dapat terealisasikan dengan baik beserta dengan dampak yang dihasilkannya terhadap pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kemudian pemahaman mengenai konsep yang akan digunakan beserta dengan analisis dari konsep terhadap isu atau permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat.

Sesuai dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pihak (stakeholder), khususnya pemerintah, yang diarahkan untuk memenuhi keinginan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan adalah seperangkat rencana program, kegiatan, tindakan, hasil akhir, dan perilaku yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kebijakan adalah seperangkat tindakan atau kelambanan yang dilakukan oleh aktor (pihak). Untuk menemukan bagaimana Implementasi kebijakan program Lorong Wisata Kota Makassar dalam pemulihan ekonomi Kota Makassar pasca COVID-19, peneliti menggunakan teori kebijakan publik menurut Aslinda.

Berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Susilawati Susilawati, Reinpal Falefi & Agus Purwoko, 2020, Impact of Covid—19’s Pandemic on the Economy of Indonesia, Budapest International Research and Critics Institute –Journal (BIRCI-Journal), Vol.3 No.2, Hal 1147-1156

<sup>43</sup> *Ibid*

## Bagan 1.1 Skema Pemikiran

